

EFEKTIVITAS ALOKASI ANGGARAN BIAYA OPERASIONAL PERKANTORAN (BOP) PADA KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Rustan^{1(a)}, Muliani S^{2(b)}, Andi Nilwana^{3(c)}, Jamaluddin^{4(d)}, Muhammad Rais^{5(e)},
Nuraini K^{6(f)}

^{1,2,3,4,5,6}Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

^{a)}rustan.kemenag@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

30-04-2025

Diterbitkan Online:

01-06-2025

Kata Kunci:

Efektivitas Anggaran, Biaya Operasional Perkantoran, Kantor Urusan Agama, Sidenreng Rappang

Keywords:

Budget Effectiveness, Office Operational Costs, Religious Affairs Office, Sidenreng Rappang

Corresponding Author:

rustan.kemenag@gmail.com

DOI:

<https://doi.org/10.24036/publicness.v4i2.264>

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis efektivitas alokasi Biaya Operasional Perkantoran (BoP) pada Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. Menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, studi ini berfokus pada pengelolaan anggaran, perencanaan keuangan, efektivitas alokasi dana, serta identifikasi hambatan implementasi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, analisis dokumentasi, dan observasi langsung, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa efektivitas alokasi BoP masih menghadapi kendala signifikan, antara lain: keterbatasan partisipasi pegawai dalam proses perencanaan anggaran, alokasi dana yang tidak proporsional dengan kebutuhan operasional, serta keterlambatan pencairan yang menghambat kontinuitas layanan publik. Faktor penghambat utama meliputi minimnya transparansi pengelolaan, keterbatasan kompetensi SDM dalam administrasi keuangan, dan inkonsistensi kebijakan yang menyebabkan instabilitas anggaran. Penelitian ini merekomendasikan reformasi sistem pencairan dana, peningkatan transparansi anggaran, dan pengembangan kapasitas SDM untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan BoP dan optimalisasi pelayanan KUA di Kabupaten Sidenreng Rappang.

ABSTRACT

This research analyzes the effectiveness of Office Operating Costs (BoP) allocation at the Office of Religious Affairs (KUA) in Sidenreng Rappang Regency, South Sulawesi. Using a quantitative descriptive approach, this study focuses on budget management, financial planning, funding allocation effectiveness, and identification of implementation barriers. Data was collected through in-depth interviews, document analysis, and direct observation, then analyzed using data reduction techniques, data presentation, and conclusion drawing. The results reveal that BoP allocation effectiveness still faces significant challenges, including limited employee participation in the budget planning process, disproportionate fund allocation relative to operational needs, and disbursement delays that impede public service continuity. The main inhibiting factors include minimal management transparency, limited human resource competencies in financial administration, and policy inconsistencies causing budget instability. This research recommends reforms to the fund disbursement system, increased budget transparency, and human resource capacity development to enhance BoP management effectiveness and optimize KUA services in Sidenreng Rappang Regency.

PENDAHULUAN

Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran fundamental sebagai ujung tombak pemerintah dalam memberikan pelayanan publik di bidang keagamaan, terutama pada tingkat kecamatan. KUA tidak hanya bertanggung jawab atas pencatatan pernikahan dan rujuk, tetapi juga melayani konsultasi keagamaan, penyuluhan keluarga sakinah, serta pembinaan umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan keagamaan. Keberadaan KUA menjamin akses masyarakat terhadap layanan keagamaan yang legal, tertib administrasi, serta sesuai dengan ketentuan hukum negara dan syariat Islam, sehingga menjadikannya sebagai institusi strategis dalam menjembatani antara negara dan kebutuhan spiritual masyarakat (Arifin, 2023).

Dalam konteks desentralisasi fiskal dan kebijakan otonomi daerah, keberadaan KUA sangat terkait dengan bagaimana pemerintah pusat dan daerah mengelola serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung fungsi pelayanan publik keagamaan. Meski KUA berada di bawah naungan Kementerian Agama, kebutuhan operasional di tingkat kecamatan kerap kali dipengaruhi oleh sinergi dan koordinasi dengan pemerintah daerah. Alokasi anggaran yang memadai sangat krusial untuk menjamin tersedianya sumber daya, infrastruktur, serta program pembinaan keagamaan yang berkualitas. Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung anggaran operasional KUA menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pelayanannya (Fahmi, 2022).

Pengelolaan anggaran publik, termasuk Biaya Operasional Perkantoran (BOP) di lingkungan instansi seperti KUA, kini berada di bawah sorotan tuntutan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas yang semakin tinggi. Masyarakat menuntut transparansi dalam penggunaan dana publik serta hasil yang sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan. Oleh karena itu, pengelolaan BOP harus dilakukan dengan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tepat sasaran, dan pelaporan yang akurat. KUA sebagai instansi layanan publik harus mampu membuktikan bahwa setiap rupiah yang digunakan membawa manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan keagamaan kepada masyarakat (Nurhadi, 2021).

Biaya Operasional Perkantoran (BOP) dalam konteks KUA merujuk pada anggaran rutin yang digunakan untuk mendukung kelancaran aktivitas administrasi dan pelayanan publik keagamaan sehari-hari. Komponen BOP mencakup berbagai jenis pengeluaran seperti pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK), biaya pemeliharaan gedung dan peralatan, transportasi untuk kegiatan dinas, biaya komunikasi, serta kebutuhan operasional lainnya yang menunjang fungsi kelembagaan KUA. Keberadaan BOP yang proporsional dan tepat guna menjadi fondasi bagi terselenggaranya layanan yang efektif, efisien, dan berkesinambungan di tengah dinamika kebutuhan masyarakat.

Ketidakefektifan dalam alokasi BOP dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang signifikan terhadap kinerja KUA, baik dari segi pelayanan maupun manajemen internal. Salah satu dampak utama adalah terhambatnya proses layanan kepada masyarakat akibat keterbatasan sarana dan prasarana, serta berkurangnya motivasi dan produktivitas staf karena minimnya dukungan logistik. Selain itu, kurangnya anggaran untuk pemeliharaan kantor atau kegiatan pembinaan dapat menurunkan citra institusi dan mengurangi kepercayaan publik. Dalam jangka panjang, ketidakefisienan penggunaan BOP juga berisiko menyebabkan pemborosan anggaran negara dan lemahnya capaian program-program strategis di bidang keagamaan.

Efektivitas alokasi BOP memiliki keterkaitan langsung dan signifikan dengan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh KUA kepada masyarakat. Ketika anggaran dialokasikan secara tepat, efisien, dan sesuai prioritas kebutuhan, maka hal tersebut akan memperkuat kapasitas institusi dalam menyediakan layanan yang responsif, profesional, dan memenuhi ekspektasi publik. Sebaliknya, alokasi yang tidak terarah akan menghambat inovasi layanan, memperlambat proses administrasi, dan menciptakan ketimpangan dalam pemenuhan hak-hak masyarakat atas layanan keagamaan. Oleh karena itu, pengelolaan BOP yang baik menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan pelayanan KUA yang berkualitas dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Penelitian oleh Angga Marzuki (2020) dalam *Jurnal Bimas Islam* mengkaji implikasi alokasi BOP terhadap peningkatan layanan publik di KUA. Melalui pendekatan studi kasus

kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa meskipun BOP berperan penting dalam mendukung program-program KUA, pengelolaannya masih terkendala oleh kontrol dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten. Hal ini menyebabkan keterbatasan dalam pelaksanaan sembilan fungsi layanan KUA secara optimal. Penelitian ini menekankan perlunya desentralisasi pengelolaan BOP agar KUA Kecamatan memiliki kewenangan penuh dalam penggunaan dan pengelolaan anggaran untuk meningkatkan efektivitas layanan kepada masyarakat (Maryam, 2016)

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rizki Candra Zaputra dan Muhammad Tauhid (2022) di Jurnal Seulanga, dianalisis kinerja keuangan Kantor Kementerian Agama Kota Langsa berdasarkan laporan realisasi anggaran tahun 2022. Dengan metode deskriptif kuantitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas kinerja keuangan berada pada rasio 90-100%, menandakan efektivitas yang tinggi. Namun, efisiensi pengelolaan anggaran masih perlu ditingkatkan. Penelitian ini menyoroti pentingnya pengelolaan keuangan yang tidak hanya efektif tetapi juga efisien untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik

Penelitian oleh Syelita Nisa Zalzabilla dan rekan-rekannya (2023) dalam Al-Munazzam: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Manajemen Dakwah mengevaluasi efektivitas manajemen pelayanan di KUA Kecamatan Konda. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, ditemukan bahwa manajemen pelayanan telah berjalan cukup baik, ditunjukkan dengan alur pendaftaran nikah yang terstruktur. Faktor pendukung utama adalah tanggung jawab dan loyalitas tinggi dari pegawai KUA. Namun, keterbatasan fasilitas seperti jaringan internet dan sumber daya manusia yang kurang memadai menjadi hambatan dalam pelaksanaan pelayanan, terutama dalam layanan nikah online. Penelitian ini menekankan perlunya peningkatan fasilitas dan kapasitas SDM untuk mendukung efektivitas pelayanan di KUA

Selain itu, dalam observasi penulis ditemukan bahwa beberapa KUA menghadapi kesulitan dalam mengelola anggaran BoP secara efisien karena kurangnya pelatihan atau panduan yang jelas dari pemerintah mengenai pengelolaan keuangan publik (Rifki, 2020). Kondisi ini juga berdampak pada kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh KUA. Berdasarkan survei yang dilakukan

oleh penulis, banyak masyarakat yang merasa bahwa pelayanan di KUA kurang responsif dan efisien, terutama dalam hal administrasi pernikahan dan pelayanan lainnya yang terkait dengan urusan agama (Rina, 2023). Keluhan ini sering kali terkait dengan keterbatasan anggaran yang menyebabkan keterbatasan sumber daya dan fasilitas di KUA (Samsul, 2023).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penganggaran BoP KUA di Kecamatan Kabupaten Sidenreng Rappang. Fokus penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi sejauh mana kebijakan penganggaran yang diterapkan saat ini mampu memenuhi kebutuhan operasional KUA, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan anggaran di KUA (Zainuddin, 2023).

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah dan Kementerian Agama mengenai pentingnya penyusunan kebijakan penganggaran yang lebih responsif terhadap kebutuhan nyata di lapangan (Hasan, 2022). Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pengelola KUA untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola anggaran operasional secara lebih efektif dan efisien (Zulkifli, 2023).

Penelitian ini juga penting dalam konteks yang lebih luas, yaitu bagaimana kebijakan penganggaran di sektor publik dapat mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Hidayat, 2021). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya peningkatan kualitas layanan publik, khususnya di sektor keagamaan (Wahid, 2020).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dirumuskan masalah bagaimanakah efektivitas alokasi anggaran (BoP) pada KUA di Kabupaten Sidenreng Rappang?.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan. Data dalam penelitian ini mencakup informasi mengenai pelaksanaan pengelolaan Biaya Operasional Perkantoran (BoP), perencanaan anggaran, efektivitas alokasi dana, serta hambatan-

hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2025 dengan jumlah responden sebanyak 50 orang yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Kriteria pemilihan narasumber adalah individu yang memiliki pengetahuan atau pengalaman langsung terkait dengan topik penelitian serta dianggap mampu memberikan informasi yang relevan dan mendalam sesuai dengan tujuan studi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas alokasi anggaran Biaya Operasional Perkantoran (BoP) pada Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Sidenreng Rappang. Melalui wawancara dengan kepala KUA, pengelola keuangan, dan pegawai, ditemukan bahwa proses perencanaan anggaran dilakukan secara tahunan dengan menyusun kebutuhan prioritas sesuai pedoman dari instansi pusat. Namun, sebagian besar responden menyatakan bahwa penyusunan anggaran masih didominasi oleh kepala KUA dan tim pengelola, sedangkan keterlibatan pegawai lainnya tergolong rendah. Hal ini menunjukkan rendahnya partisipasi internal yang berpotensi mempengaruhi akurasi penganggaran.

Dalam hal kecukupan anggaran, mayoritas responden menyebut bahwa dana yang diterima tidak selalu mencukupi kebutuhan operasional. Responden dari kalangan penyuluh dan pengelola keuangan mengeluhkan adanya kekurangan dana, khususnya untuk pemeliharaan fasilitas dan operasional harian. Salah satu pengelola menyampaikan bahwa mereka harus menyesuaikan kebutuhan dengan anggaran terbatas dan melakukan efisiensi di berbagai aspek. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara anggaran yang diusulkan dan yang disetujui atau dicairkan.

Selanjutnya, terkait pemanfaatan anggaran BoP, responden menjelaskan bahwa dana banyak digunakan untuk pemeliharaan gedung, pengadaan alat tulis kantor, dan pembayaran listrik. Namun, karena keterbatasan dana, beberapa kebutuhan pemeliharaan terpaksa ditunda. Pengelola keuangan menyebutkan bahwa beberapa kegiatan perbaikan hanya dapat dilakukan jika benar-benar mendesak. Ini

memperkuat temuan bahwa penggunaan anggaran masih bersifat prioritas minimal dan tidak menjangkau semua kebutuhan.

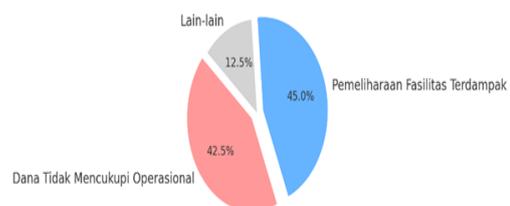
Masalah krusial lainnya adalah keterlambatan pencairan dana. Sebagian besar kepala KUA dan pengelola anggaran menyatakan bahwa keterlambatan pencairan BoP sering terjadi dari tahun ke tahun. Dampaknya, operasional KUA terganggu, dan pelayanan publik ikut terdampak. Bahkan dalam beberapa kasus, pegawai harus menggunakan dana pribadi terlebih dahulu untuk menutupi kebutuhan operasional mendesak. Hal ini menunjukkan lemahnya sistem distribusi anggaran yang berdampak langsung pada efektivitas pelayanan.

Berikut adalah grafik lingkaran yang menggambarkan berbagai permasalahan utama dalam pengelolaan anggaran BoP di KUA Kabupaten Sidenreng Rappang. Grafik ini menunjukkan bahwa keterlambatan pencairan dana (90%) dan ketidakcukupan dana operasional (85%) menjadi isu paling dominan. Apakah Anda ingin grafik ini disimpan dalam format tertentu.



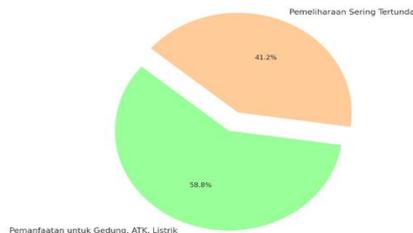
Gambar 1. Permasalahan dalam Pengelolaan Anggaran BoP di KUA Sidrap

Grafik lingkaran selanjutnya menggambarkan kecukupan anggaran BoP di KUA Kabupaten Sidenreng Rappang. Grafik ini menunjukkan bahwa 85% responden menyatakan dana tidak mencukupi untuk kebutuhan operasional, dan 90% menyebut pemeliharaan fasilitas sebagai aspek yang paling terdampak.



Gambar 2. Kecukupan Anggaran BoP di KUA Sidrap

Berikut adalah grafik lingkaran yang menggambarkan pemanfaatan dana BoP di KUA Sidenreng Rappang. Seluruh responden (100%) menyatakan bahwa dana digunakan untuk perbaikan gedung, alat tulis kantor (ATK), dan pembayaran listrik, sementara 70% menyebut bahwa kebutuhan pemeliharaan sering tertunda.



Gambar 3. Pemanfaatan Dana BoP di KUA Sidrap

Grafik lingkaran berikut menggambarkan hasil survei mengenai keterlambatan pencairan dana. Sebanyak 90% responden mengungkapkan bahwa mereka mengalami keterlambatan dalam pencairan dana yang seharusnya mereka terima, menunjukkan adanya masalah dalam proses administrasi atau pengelolaan dana. Selain itu, 60% responden menyatakan bahwa keterlambatan ini mengganggu pelayanan yang mereka terima, mengindikasikan dampak negatif pada kualitas pelayanan yang diberikan. Lebih lanjut, 40% responden melaporkan bahwa mereka pernah menggunakan dana pribadi untuk menutupi kebutuhan mendesak yang seharusnya dipenuhi melalui pencairan dana, mencerminkan betapa pentingnya pencairan tepat waktu dalam mengatasi kebutuhan mendesak. Grafik ini memberikan gambaran jelas tentang bagaimana keterlambatan pencairan memengaruhi baik aspek keuangan pribadi maupun kualitas pelayanan yang diterima responden.



Gambar 4. Keterlambatan Pencairan

Pengelolaan Biaya Operasional Perkantoran (BoP) di KUA Kabupaten Sidenreng Rappang

memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran operasional dan pelayanan publik, namun masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan anggaran, rendahnya partisipasi pegawai dalam perencanaan, serta keterlambatan pencairan dana yang menghambat efektivitas pelayanan. Meskipun telah dilakukan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui pelaporan dan pengawasan, perbaikan sistem pencairan dan pengelolaan anggaran tetap diperlukan agar BoP dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang kualitas layanan di KUA..

Pengelolaan Biaya Operasional Perkantoran (BoP) di KUA Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dianalisis melalui perspektif teori administrasi publik yang menekankan pada efisiensi, efektivitas, dan responsivitas pelayanan publik. Dalam konteks ini, BoP berperan sebagai sumber daya penting yang mendukung fungsi administratif dan pelayanan masyarakat, sehingga manajemen menjadi bagian integral dari sistem pelayanan publik yang baik. Namun, keterbatasan anggaran menunjukkan adanya masalah dalam alokasi dan distribusi sumber daya publik, yang menurut teori administrasi publik klasik harus dirancang secara rasional dan sistematis agar tidak menghambat kinerja organisasi pemerintah.

Lebih lanjut, rendahnya partisipasi pegawai dalam proses perencanaan anggaran mencerminkan kurangnya penerapan prinsip partisipatif dalam pengambilan keputusan publik, sebagaimana ditekankan dalam teori administrasi publik modern. Model ini menekankan perlunya kolaborasi antara berbagai aktor organisasi untuk menciptakan kebijakan yang inklusif dan akuntabel. Ketika pegawai tidak dilibatkan secara aktif, maka kebutuhan dan realitas di lapangan kurang terakomodasi dalam proses penyusunan anggaran, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya efektivitas program yang dijalankan. Di sisi lain, keterlambatan pencairan dana menandakan adanya hambatan dalam aspek koordinasi birokrasi, yang menurut teori birokrasi Weberian, seharusnya dapat diminimalisir dengan struktur dan prosedur kerja yang tertib serta terstandarisasi.

Upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui pelaporan dan pengawasan mencerminkan penerapan prinsip good governance, yang merupakan bagian penting dalam administrasi publik kontemporer.

Namun demikian, tantangan masih muncul karena sistem pencairan dan pengelolaan anggaran belum sepenuhnya efisien dan adaptif terhadap kebutuhan pelayanan. Teori administrasi publik baru menekankan pentingnya inovasi manajerial dan fleksibilitas dalam pengelolaan sumber daya publik agar pelayanan dapat lebih responsif dan berorientasi pada hasil. Oleh karena itu, perbaikan sistem yang lebih integratif dan berbasis kinerja perlu dilakukan agar BoP benar-benar berfungsi optimal sebagai instrumen pendukung pelayanan publik yang berkualitas di lingkungan KUA.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Azhar dan Khodra (2021) yang menjelaskan bahwa pemanfaatan model Multilingual BERT (m-BERT) dalam analisis sentimen berbasis aspek pada ulasan hotel berbahasa Indonesia berhasil meningkatkan performa klasifikasi secara signifikan, dengan peningkatan F1-score sebesar 8% dibandingkan metode sebelumnya seperti CNN dan XGBoost. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan representasi bahasa pra-latih yang canggih dapat mengatasi masalah kata-kata yang tidak dikenal (OOV) dan meningkatkan generalisasi model pada data uji.

Selanjutnya, penelitian oleh Fransiscus dan Girsang (2022) juga mendukung temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa model IndoBERT mampu mengungguli metode klasik seperti SVM dan Naïve Bayes dalam menganalisis sentimen masyarakat terhadap kebijakan PPKM di Indonesia, dengan mencapai F1-score sebesar 84%. Hal ini menegaskan keunggulan model BERT dalam memahami konteks bahasa Indonesia yang kompleks. (Iskandar, 2022)

Selain itu, Iskandar et al. (2022) dalam tinjauan literatur sistematis mengenai etnomatematika dalam geometri menyoroti pentingnya pendekatan kontekstual dan budaya dalam pendidikan matematika di Indonesia. Meskipun fokusnya berbeda, penelitian ini menekankan perlunya adaptasi metode analisis yang sesuai dengan konteks lokal, sejalan dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini untuk meningkatkan relevansi dan akurasi analisis data.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas alokasi anggaran

Biaya Operasional Perkantoran (BoP) pada KUA di Kabupaten Sidenreng Rappang masih tergolong belum optimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya partisipasi pegawai dalam perencanaan anggaran, keterbatasan dana yang tidak mencukupi seluruh kebutuhan operasional terutama dalam hal pemeliharaan fasilitas serta seringnya terjadi keterlambatan pencairan anggaran. Kondisi tersebut berdampak langsung pada terganggunya operasional KUA dan menurunnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem penganggaran dan penyaluran dana guna mendukung pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien di lingkungan KUA.

Berdasar pada kesimpulan di atas, maka disarankan peningkatan partisipasi dalam perencanaan anggaran diperlukan pelibatan yang lebih aktif dari seluruh pegawai KUA dalam proses perencanaan anggaran BoP agar alokasi dana benar-benar mencerminkan kebutuhan riil operasional. Hal ini dapat dilakukan melalui forum musyawarah internal atau pelatihan penganggaran partisipatif di lingkungan KUA. Pemerintah daerah dan instansi terkait perlu meninjau kembali sistem penyaluran anggaran agar pencairan dana BoP dapat dilakukan secara tepat waktu. Hal ini penting untuk memastikan kelangsungan layanan publik di KUA tidak terganggu, serta mencegah terjadinya penggunaan dana pribadi oleh pegawai untuk menutupi kebutuhan mendesak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, B. (2023). Pengelolaan Anggaran di KUA Kecamatan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(2), 145-162.
- Azhar, A. N. (2021). Fine-tuning Pretrained Multilingual BERT Model for Indonesian Aspect-based Sentiment Analysis. . *arXiv preprint arXiv:2103.03732*.
- Fahmi, T. (2022). Anggaran dan Efektivitas Pelayanan Publik. *Jurnal Administrasi Negara*, 13(4), 110-128.
- Fransiscus, A. S. (2022). Sentiment Analysis of COVID-19 Public Activity Restriction (PPKM) Impact using BERT Method. . *arXiv preprint arXiv:2301.00096*.

- Hasan, M. (2022). Kebijakan Publik dan Penganggaran di KUA. *Jurnal Manajemen Publik*, 8(4), 235-252.
- Hidayat, R. (2021). Efisiensi Pengelolaan Keuangan di KUA. *Jurnal Ekonomi Publik*, 14(2), 180-195.
- Iskandar, R. S. (2022). A systematic literature review on ethnomathematics in geometry. *. arXiv preprint arXiv:2212.11788*.
- Maryam, N. S. (2016). Kebijakan Pengelolaan Biaya Operasional Perkantoran pada Kantor Urusan Agama (KUA). *Jurnal Bimas Islam Kementerian Agama RI. Diakses dari jurnalbimasislam.kemenag.go.id*.
- Marzuki, A. (2020). Peningkatan layanan publik dan biaya operasional perkantoran KUA: Sejarah, pengelolaan dan implikasi terhadap layanan KUA. *Jurnal Bimas Islam*, 13(1), 183–199.
- Nurhadi, F. (2021). KUA dan Pengelolaan Anggaran Operasional. *Jurnal Kebijakan Keuangan Publik*.
- Putra, Y. D. (2022). *Pengelolaan Biaya Operasional Perkantoran (BoP) di KUA Kecamatan Sungai Pinang*. Kabupaten Ogan Ilir: Universitas Sriwijaya. Diakses dari repository.unsri.ac.id.
- Rahman, A. (2020). *Tantangan Pengelolaan Anggaran di KUA*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Rifki, M. (2020). Keterbatasan Anggaran di Kantor Pelayanan Publik. *Jurnal Administrasi Negara*, 12(1), 90-105.
- Rina, D. (2023). Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan KUA. *Jurnal Pelayanan Publik*, 10(2), 134-150.
- Salim, Y. (2022). Pengaruh BoP Terhadap Kinerja KUA. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(3), 215-230.
- Samsul, H. (2023). Masalah Pengelolaan Anggaran di Kantor Urusan Agama. *Jurnal Ekonomi Publik*, 15(1), 140-156.
- Wahid, M. (2020). Tantangan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Publik. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 14(1), 67-80.
- Zainuddin, A. (2023). Pengelolaan Keuangan Publik di Sektor Keagamaan: Studi Kasus Kantor Urusan Agama. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 17(2), , 98-115.
- Zalzabilla, S. N. (2023). Efektivitas manajemen pelayanan di Kantor Urusan Agama (KUA). *. Al-Munazzam: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Manajemen Dakwah*, 5(1).
- Zaputra, R. C. (2022). Efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan berdasarkan laporan realisasi anggaran pada Kantor Kementerian Agama Kota Langsa tahun 2022. *Seulanga*, 1(1).
- Zulkifli, A. (2023). Analisis Pengelolaan Anggaran Publik di Institusi Keagamaan. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 85-102.